

Press Release INDEF 09 Oktober 2008

Koreksi Suku Bunga Tinggi dan Batalkan Rencana BuyBack

Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa dalam satu krisis yang parah selalu terdapat satu atau lebih elemen kebijakan yang salah dan berakibat fatal. Dalam krisis ekonomi-sosial-politik di tahun 1997/1998, misalnya, kebijakan fatal yang menenggelamkan bangsa ini kala itu adalah kebijakan pemerintah, atas saran dan paksaan IMF, untuk menutup 16 bank.

Kebijakan penutupan tersebut terbukti dengan sejelas-jelasnya secara akademis dan empiris sebagai pemicu dari keterpurukan perekonomian nasional, yang baru bisa kemudian bangkit – walau masih terpapa-papa – sepuluh tahun kemudian. Tanpa blunder ini, krisis saat itu akan hanya sekedar riak resesi biasa yang bersifat temporer dan seharusnya bisa dilalui dengan tenang dan tanpa huru-hara.

Saat ini, ditengah ancaman krisis yang sudah di depan mata, beberapa kebijakan reaktif yang bisa menjadi bumerang bagi perekonomian pun sudah dilakukan.

Dalam kebijakan moneter, misalnya, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan pengetatan moneter berupa kenaikan suku bunga, yang justru berlawanan dengan kebijakan dan kecenderungan di negara-negara lain yang melakukan kebijakan ekspansif.

Di saat sama, pemerintah juga merencanakan untuk melakukan buyback saham-saham BUMN secara besar-besara, dengan alasan untuk menopang kejatuhan bursa dan memompa likuiditas pada pasar uang.

Kami menilai bahwa kedua kebijakan ini tidak tepat dan perlu dikoreksi serta dibatalkan. Alasan meningkatkan suku bunga untuk menahan kenaikan inflasi adalah tidak relevan saat ini. Sebab ke depan terdapat prospek penurunan harga pangan dan minyak sebagai akibat resesi global yang akan mengurangi tekanan terhadap inflasi domestik. Sebaliknya, peningkatan suku bunga justru akan memangkas investasi, serta menggerus keunggulan komparatif perdagangan di tengah prospek persaingan perdagangan yang mengetat.

Selain itu, suku bunga tinggi juga akan menyebabkan turunnya aktivitas investasi, kemampuan perekonomian menyerap tenaga kerja dan mengikis pendapatan di masa depan. Kebijakan ini juga akan memperparah ketimpangan pendapatan. Pendapatan rata-rata masyarakat akan tertekan, sementara mereka yang mampu dan memiliki aset kebijakan ini justru akan menguntungkan karena menyelamatkan nilai aset dan memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan lebih tinggi.

Demikian pula, kami menilai rencana kebijakan buyback saham pemerintah saat ini akan bersifat konterproduktif dan merugikan rakyat. Beberapa alasan kami adalah sebagai berikut.

Pertama, rencana ini akan tidak signifikan dan mampu menolong kejatuhan bursa yang disebabkan kepanikan. Sebaliknya, kebijakan ini akan menolong pihak-pihak yang tidak perlu ditolong dan sekedar menguntungkan para pemilik modal dan para spekulator.

Kedua, rakyat dan bangsa ini tidak menginginkan lagi adanya uang negara digunakan untuk menopang perusahaan yang sesungguhnya memang sudah insolvent dan tidak bernilai secara fundamental, akan tetapi belum disadari atau sengaja tidak disadari saat ini.

Ketiga, akan muncul pertanyaan saham perusahaan apa yang akan dibeli dan pada harga berapa saham ini dibeli. Pada titik ini, kebijakan akan rawan dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh banyak pihak yang memancing di air keruh dan melahirkan praktik-praktik rent-seeking.

Sesungguhnya, ketidakproduktifan rencana ini sudah secara samar ditunjukkan oleh respon pasar. Sebab, alih-alih menenangkan, kebijakan pengetatan moneter dan rencana buyback saham justru terbukti menyebabkan makin merebaknya sentimen negatif dan keambrokan nilai rupiah dan indeks. Satu hal ironis saat ini sedang terjadi di pasar. Di tengah-tengah pelemahan kurs dollar AS (USD) terhadap mata uang hampir semua negara, kurs rupiah justru terus melemah terhadap USD, melampaui level Rp 9.500 per USD, bahkan sempat ke titik tertinggi di kisaran Rp 9.800 per USD.

Oleh karena itu, kami memandang pengetatan kebijakan moneter ketat harus sesegera mungkin dikoreksi. Begitu juga rencana buyback saham BUMN harus segera dibatalkan. Kondisi saat ini mengharuskan adanya sebuah kebijakan yang terukur dan kredibel dari Bank Indonesia dan Pemerintah. Bukan kebijakan pesanan yang memicu lebih dalam kepanikan dan konterproduktif bagi perekonomian.